

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dan dilihat secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, merupakan wilayah yang tergolong rawan bencana, bahkan termasuk negara kedua rentan bencana dunia. Kejadian bencana di Indonesia, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia akan menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis lainnya (Vivanews, 2011). Secara Geologis Indonesia terletak dijalur yang dilalui oleh dua pegunungan muda yaitu Pegunungan Mediterania disebelah barat dan pegunungan Pasific disebelah timur menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan rawan terjadi bencana, bencana alam yang sering terjadi di wilayah Indonesia antara lain : banjir, kemarau panjang, tsunami, gempa bumi, gunung berapi dan tanah longsor.

Beberapa kejadian bencana di Indonesia yang tergolong besar beberapa tahun belakangan ini antara lain : gempa bumi /tsunami Aceh & Nias pada 26 Desember 2004 (9,0 SR); gempa Yogyakarta 27 Mei 2006 (6,3 SR); gempa di Manokwari Papua pada Januari 2009 (7,2 & 7,6 SR); gempa di Sumatera Barat pada 30 September 2009 (7,6 SR). Bencana gunung meletus terjadi pada Gunung Berapi di Jawa Tengah/Yogyakarta 26 Oktober 2006, sedangkan bencana banjir di Langkat, Sumatera Utara pada September 2004, juga di Sulawesi pada 20 Juni 2006, di Jakarta 1 Februari 2007, Wasior Papua Barat pada 4 Oktober 2010. Adapun bencana tanah longsor terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan pada 2009, dan di

Bandung Jawa Barat pada 23 Februari 2010 (Pusat Data dan analisa Tempo. Indonesia rawan bencana: <http://www.pdat.co.id/>)

Kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat yang memiliki letak geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah. Sebagai contoh Gempa 30 September 2009 berkekuatan 7,9 Skala Richter dengan kedalaman 71 km sebelah barat daya Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang mengakibatkan banyaknya terjadi korban baik dari segi materil maupun korban jiwa. Bencana ini adalah bencana nasional bagi Negara Indonesia karena jumlah korban yang berjatuhan sangat banyak.

Daerah-daerah yang terkena dampaknya adalah Kota Padang, Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman Barat dan sebahagian kecil lagi wilayah Kabupaten Agam. Bencana ini menimbulkan korban sebanyak 1.117 korban meninggal, 2 orang hilang, 1.214 orang luka berat dan 1.688 orang luka ringan (Tim Pendukung Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 2010). Tidak hanya korban nyawa, bencana ini juga mengakibatkan beberapa rumah masyarakat rusak. Kerusakan itu meliputi : 114.797 rusak berat dan roboh, 67.198 rusak sedang serta 67.838 rusak ringan (Tim Pendukung Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 2010). Bencana ini juga merusak beberapa bangunan dan infrastruktur masyarakat seperti: 9.432 unit bagunan public, 442 unit kantor pemerintah, 4.748 unit fasilitas pendidikan, 4.748 unit fasilitas pendidkan, 153 unit fasilitas kesehatan,

68 unit jembatan serta 2.851 unit tempat ibadah (Tim Pendukung Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 2010).

Berdasarkan analisis, bencana gempa ini disebabkan oleh keadaan lokasi topografi daerah Sumatera Barat dan struktur bangunan masyarakat yang terkena gempa. Dalam hal ini semua kalangan atau pakar gempa pasti tahu bahwa rumah-rumah yang dibangun oleh masyarakat khususnya di daerah Sumatera Barat kebanyakan standarisasinya terhadap aman gempa tidak terpenuhi. Pada sisi lainnya para pakar dan ahli gempa juga menganalisis bahwa bencana gempa ini bisa terjadi lagi bahkan dengan magnitude Skala Richter-nya yang besar disertai gelombang Tsunami, mengingat daerah Sumatera Barat terletak tidak jauh dengan lokasi lempengan bumi di Samudera Pasifik. Khusus di Kota Padang yang merupakan salah satu kota di Sumatera Barat, gempa rutin terjadi hampir disetiap tahunnya dan juga daerah rawan Tsunami. Hal ini terjadi karena Kota Padang berada diantara pertemuan dua lempeng benua besar, lempeng Eurasia dan lempeng India-Australia. Pergerakan lempeng-lempeng ini berpotensi menimbulkan gempa, ditambah dengan aktivitas gunung berapi yang masih aktif dan tidak jauh letaknya dari Kota Padang, seperti Gunung Merapi, Tandikat, dan Talang maka potensi gempa yang rutin terjadi di wilayah ini adalah sangat besar.

Mengantisipasi efek dari bencana di Indonesia, pemerintah sebelumnya telah memiliki lembaga yang dikenal dengan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) di tingkat pusat, serta Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) di provinsi serta Satuan pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) di kabupaten/kota. Dalam perjalanannya

kemudian, untuk menata keefektifan serta meningkatkan kinerja lembaga penanggulangan bencana, sejak tahun 2008 dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat, sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pembentukan lembaga tersebut merupakan amanat Undang-Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Badan tersebut dibentuk untuk membantu masyarakat dalam rangka menanggulangi masalah kebencanaan yang terjadi.

Dalam Bab IV UU No. 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang kelembagaan, dinyatakan bahwa BNPB merupakan lembaga di tingkat nasional yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Adapun di tingkat daerah, badan dimaksud disebut dengan BPBD. Badan ini terdapat di tingkat provinsi dan masing-masing daerah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja lembaga BNPB diatur dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang BNPB, sedangkan ketentuan mengenai BPBD diatur dengan peraturan daerah masing-masing.

BPBD berfungsi sebagai perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Salah satu wujud reformasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah yang pembangunannya harus dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana maka dibentuklah BPBD Kota Padang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Padang. Dalam hal ini BPBD Kota Padang merupakan Badan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai wadah dalam penanggulangan bencana khususnya di Kota Padang.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Padang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. BPBD Kota Padang adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Padang.

Sekalipun organisasi BPBD sama dalam struktur dan tugas pokok dan fungsinya, namun dalam pelaksanaan kegiatan BPBD provinsi-provinsi di Indonesia terlihat banyak perbedaan dalam pencapaian hasil kerja. Pada rapat koordinasi nasional BNPB di Jakarta Februari 2012, BNPB memberikan penghargaan atas kinerja BPBD provinsi se-Indonesia. Penghargaan ini didasarkan pada kategori,

antara lain: pra-bencana, tanggap darurat, pasca bencana, logistik dan peralatan, akuntabilitas dan perencanaan , keuangan dan kelembagaan.

Tabel 1.1
Menunjukkan BPBD Propinsi Terbaik
Tahun 2012

No	Kategori	Juara I	Juara II	Juara III
1	Pra – Bencana	Sumatera Selatan	NTT	Jawa Barat
2	Tanggap darurat	Sulawesi Utara	Jawa Tengah	Sumatera Selatan
3	Pasca bencana	Kalimantan Barat	Jawa Tengah	Jambi
4	Logistik/ Peralatan	Jawa barat	Sumatera Selatan	NTB
5	Akuntabilitas & Perencanaan	Jawa Timur	Sumatera Barat	Sulawesi Selatan
6	Keuangan & Kelembagaan	Jambi	Sulawesi Utara	Kalimantan Barat

(sumber : www.indonesia.go.id)

Berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan BNPB tersebut, BPBD Sumatera Barat mendapat Juara II dibidang Akuntabilitas Perencanaan, dan BPBD Kota Padang tampaknya belum termasuk yang memiliki prestasi dari kategori yang terbaik. Namun demikian, hasil penilaian kinerja BPBD Kota Padang belum dapat dikatakan buruk atau tidak baik, hanya karena belum mendapat penghargaan.

Oleh karena itu, berdasarkan dari penilaian kinerja yang dilakukan oleh BNPB tahun 2012 dan berdasarkan dari tugas dan fungsi dari BPBD Kota Padang tersebut dalam rangka penanggulangan bencana, maka penulis tertarik untuk mengevaluasi bagaimana kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditinjau dari aspek kesiapsiagaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana (Studi Kasus Kota Padang).

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengetahui seberapa baik tingkat kinerja BPBD Kota Padang, maka berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jabarkan di atas, rumusan masalah yang penulis himpun adalah :

1. Bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dilihat dari program dan kegiatannya yang berorientasi kepada masyarakat.
2. Apa saja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Padang dalam rangka kesiapan masyarakat terhadap program penanggulangan bencana.
3. Apa saja faktor penunjang dan penghambat yang ditemui BPBD Kota Padang khususnya dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di tahun 2014.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengevaluasi kinerja dibidang Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang yang berorientasi kepada kesiapsiagaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana.
2. Menganalisa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Padang dalam rangka kesiapan masyarakat terhadap program penanggulangan bencana.
3. Menganalisa faktor penunjang dan penghambat yang ditemui BPBD Kota Padang khususnya dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dan relevansinya dengan tujuan penelitian tersebut di atas, diharapkan penelitian ini bermanfaat dan berguna :

1. Bagi Instansi

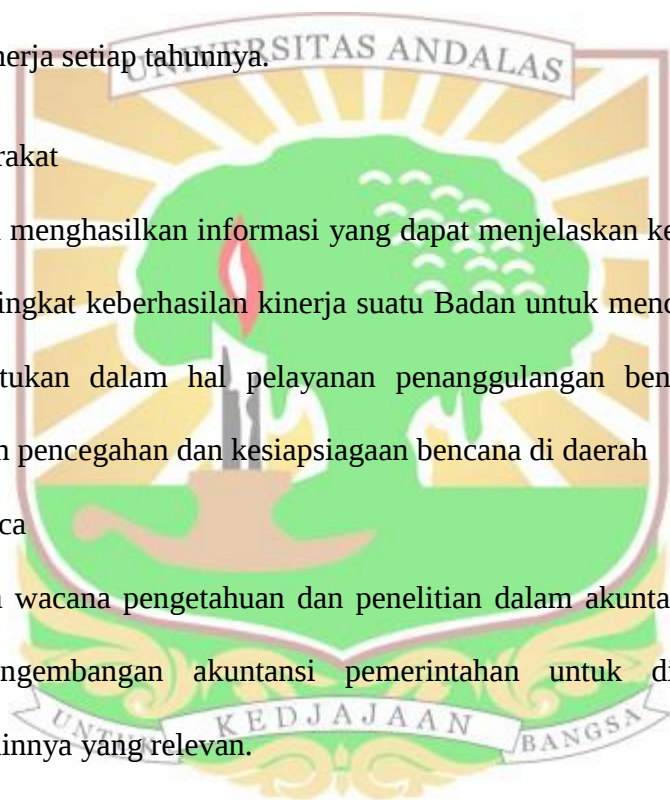
Sebagai masukan dan pertimbangan untuk Pemerintah Kota Padang khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam melakukan evaluasi kinerja setiap tahunnya.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan menghasilkan informasi yang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai tingkat keberhasilan kinerja suatu Badan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam hal pelayanan penanggulangan bencana, khususnya pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di daerah

3. Bagi pembaca

Menambah wacana pengetahuan dan penelitian dalam akuntansi sektor publik melalui pengembangan akuntansi pemerintahan untuk diteruskan dalam penelitian lainnya yang relevan.



1.5 Ruang Lingkup/ Batasan Penelitian

Untuk lebih fokus terarahnya penelitian ini maka perlu adanya suatu pembatasan masalah dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Penelitian ini adalah berupa analisis deskriptif kualitatif yang dibatasi dengan Evaluasi terhadap Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Padang khususnya terhadap kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana serta biaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan kinerja yang baik periode 2013-2014.

2. Data yang digunakan adalah data LAKIP dan data Laporan Pertanggungjawaban Walikota Padang tahun 2013-2014.

